

PERBANDINGAN AKSI, REAKSI, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL BERBAGAI NEGARA TERHADAP KONFLIK MUSLIM RONGHYA-MYANMAR DAN MUSLIM PALESTINA-ISRAEL

Farah Az Zahra Azra¹, Oktafina Yudhianti², Olga Pavita Chrisworo³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Desember 2023

Available online Desember 2023

Kata kunci: Konflik Muslim Rohingya, Konflik Palestina-Israel, Hubungan Luar Negeri, Dampak Global, Respons Internasional.



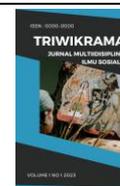
This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Aksi, Reaksi, Dan Hubungan Internasional Berbagai Negara Terhadap Konflik Muslim Ronghya-Myanmar Dan Muslim Palestina-Israel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif comparative research untuk merinci dampak-dampak tersebut dan menganalisis respons berbagai negara serta peran organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Data diperoleh melalui studi literatur, analisis kebijakan luar negeri, dan evaluasi resolusi PBB. Dalam konflik Muslim Rohingya, terjadi isolasi diplomatik dan sanksi ekonomi, sedangkan konflik Palestina-Israel menciptakan ketegangan diplomatik dan sanksi ekonomi serta sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan. Respons global mencerminkan polarisasi opini terkait konflik tersebut. Secara keseluruhan, kedua konflik menciptakan tantangan serius dalam hubungan luar negeri masing-masing negara. Dampaknya melibatkan aspek kemanusiaan, diplomatik, dan ekonomi, dengan reaksi global yang mencerminkan keragaman pandangan dan kompleksitas hubungan internasional.

Kata kunci: Konflik Muslim Rohingya, Konflik Palestina-Israel, Hubungan Luar Negeri, Dampak Global, Respons Internasional.

Pendahuluan

Konflik yang melibatkan komunitas Muslim di berbagai belahan dunia, seperti Rohingya di Myanmar dan Palestina-Israel, merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi aksi, reaksi, dan hubungan internasional berbagai negara terhadap konflik tersebut. Kedua konflik ini tidak hanya menciptakan dampak kemanusiaan yang besar, tetapi juga menciptakan ketegangan dan polarisasi di tingkat global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan aksi, reaksi, dan hubungan internasional berbagai negara terhadap konflik Muslim Rohingya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel.



Konflik di Rakhine State, Myanmar, melibatkan etnis Muslim Rohingya yang menjadi target diskriminasi sistematis dan kekerasan oleh pemerintah Myanmar. Pada Agustus 2017, serangan militer Myanmar terhadap Rohingya menyebabkan gelombang pengungsian massal ke Bangladesh dan negara-negara tetangga. Kekejaman ini memicu kecaman internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab dan peran komunitas internasional dalam menyelesaikan krisis tersebut ¹.

Konflik antara Israel dan Palestina adalah konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Inti dari konflik ini adalah persaingan klaim sejarah, wilayah, dan hak atas tanah. Kekerasan berulang kali meletus, terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat, menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan menderita bagi warga Palestina. Reaksi dunia terhadap konflik ini sangat bervariasi, menciptakan dinamika politik dan diplomasi yang rumit ².

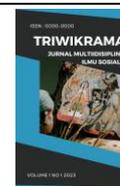
Berbagai negara dan organisasi internasional telah melakukan aksi dan memberikan reaksi terhadap kedua konflik tersebut. Dalam konflik Muslim Rohingya-Myanmar, beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki telah memberikan bantuan kemanusiaan dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Namun, beberapa negara seperti China dan Rusia telah memberikan dukungan kepada pemerintah Myanmar dan menolak campur tangan dari luar. Sementara itu, dalam konflik Muslim Palestina-Israel, banyak negara Arab dan organisasi Islam seperti Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam telah memberikan dukungan kepada Palestina dan mengecam tindakan Israel. Namun, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa telah memberikan dukungan kepada Israel dan menolak campur tangan dari luar.

Hubungan internasional antara negara-negara yang terlibat dalam kedua konflik tersebut juga berbeda-beda. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia dengan Myanmar memburuk setelah konflik Rohingya-Myanmar terjadi, sementara hubungan antara China dan Rusia dengan Myanmar tetap kuat. Di sisi lain, hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab tetap tegang, sementara hubungan antara Israel dan Amerika Serikat tetap kuat.

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut dampak, implikasi, dan dinamika yang terjadi sebagai hasil dari aksi, reaksi, dan hubungan internasional berbagai negara terhadap konflik Muslim Rohingya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dan tantangan yang terlibat dalam penyelesaian kedua konflik tersebut,

¹ Tri Joko Waluyo, 'Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar', *Jurnal Transnasional*, 4.2 (2013).

² Moh Hamli, 'Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel Dan Palestina (1920-1993)' (UIN SUNAN KALIJAGA, 2013).



serta mengidentifikasi potensi solusi yang dapat membawa kedamaian dan keadilan bagi masyarakat yang terlibat.

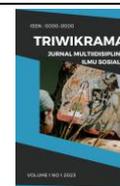
Metode

Penelitian mengenai perbandingan aksi, reaksi, dan hubungan internasional berbagai negara terhadap konflik Muslim Rohingya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial yang kompleks, seperti aksi, reaksi, dan hubungan internasional terkait konflik Muslim Rohingya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami konteks, makna, dan dinamika hubungan antar negara dalam konflik tersebut.³ Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian perbandingan atau comparative research. Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan menganalisis perbedaan serta persamaan dalam aksi, reaksi, dan hubungan internasional terkait kedua konflik tersebut. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam tentang dinamika yang mungkin muncul dalam respon negara-negara terhadap kedua konflik.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan studi literatur untuk memperoleh informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua konflik tersebut, serta aksi, reaksi, dan hubungan internasional yang terkait. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan aksi, reaksi, dan hubungan internasional berbagai negara terhadap kedua konflik tersebut. Dalam pendekatan ini, peneliti memilih beberapa negara yang dianggap memiliki peran penting dalam kedua konflik tersebut, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, China, Rusia, Amerika Serikat, dan beberapa negara Arab. Sumber data untuk penelitian ini dapat meliputi dokumen resmi pemerintah, pernyataan diplomatik, laporan media, publikasi akademis, dan sumber data sekunder lainnya yang relevan dengan aksi, reaksi, dan hubungan internasional terkait konflik tersebut.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti pernyataan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, dan laporan media. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan aksi, reaksi, dan hubungan internasional berbagai negara terhadap kedua konflik tersebut. Dalam analisis ini, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif seperti analisis isi dan analisis naratif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik. Data yang dikumpulkan akan

³ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010).



dikategorikan berdasarkan tema-tema tertentu seperti reaksi kemanusiaan, respon diplomatik, dan dampak konflik terhadap hubungan internasional. Kategorisasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari respons berbagai negara. Analisis komparatif melibatkan perbandingan data antara konflik Muslim Rohingnya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel. Penelitian ini akan mencari perbedaan dan persamaan dalam sikap, kebijakan, dan tindakan negara-negara yang terlibat.

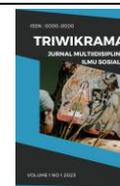
Dengan menggabungkan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang respons dan hubungan internasional terhadap konflik Muslim Rohingnya-Myanmar dan Muslim Palestina-Israel. Pendekatan ini akan memberikan wawasan yang holistik dan nuansawan terhadap kompleksitas dinamika hubungan internasional di tengah dua konflik regional yang penting ini.

Pembahasan

Latar belakang Konflik Muslim Rohingnya di Myanmar

Sejarah etnis Rohingya di Myanmar sebagai penduduk minoritas beragama Islam, bertempat tinggal di daerah Myanmar tepatnya Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan provinsi Rakhine atau Rakhaing. Etnis Rohingya diperkirakan adalah keturunan campuran (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul dan Pathan), Bengali lokal dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh. Setelah kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, etnis Rohingya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan dalam pemerintahan Myanmar. Bahkan ada warga Rohingya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950. Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter. Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan masalah entitas etnis.

Berita mengenai Muslim Rohingya muncul sebagai hasil dari konflik sektarian antara etnis Rohingya, yang mayoritas beragama Muslim, dan etnis Rakhine, yang dominan penganut Buddha. Meskipun penyebab konflik tidak sepenuhnya jelas, beberapa sumber menyebutkan bahwa kerusuhan tersebut berawal dari peristiwa perampokan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan Rakhine bernama Ma Thida Htwe pada 28 Mei 2012. Meskipun pihak kepolisian Myanmar telah menahan dan memenjarakan tiga tersangka, dua di antaranya adalah etnis Rohingya, tindakan tersebut tidak mencegah meluasnya kerusuhan di negara bagian Rakhine, yang



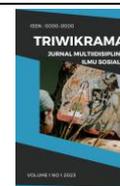
terletak di barat Myanmar. Pada tanggal 4 Juni, terjadi serangan terhadap sebuah bus yang diduga ditumpangi oleh pelaku pemerkosaan dan keluarganya, mengakibatkan kematian 10 Muslim Rohingya dan memperluas gejolak rasial di Rakhine. Sebenarnya, konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine telah terjadi selama puluhan tahun. Apa sebenarnya akar masalahnya? Salah satu akar konflik yang berlangsung lama adalah status etnis minoritas Rohingya yang dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui dan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada mereka. Akibatnya, etnis Rohingya menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Mereka benar-benar diabaikan dan terpinggirkan. Maurice Duverger menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat cenderung mengalami konflik dan integrasi yang fluktuatif. Konflik dapat berubah menjadi integrasi melalui kompromi yang didasari oleh rasa keadilan.

Konflik Muslim Rohingya di Myanmar merupakan konflik yang terjadi sejak tahun 2012 di negara bagian Rakhine, Myanmar. Konflik ini mempengaruhi sekitar 1,3 juta orang Rohingya yang menghabiskan kehidupan, dan hingga 700.000 pengungsi yang menempati di berbagai negara. Konflik ini menyebabkan aliran migrasi besar dari Myanmar ke paaran tertangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.⁴ Konflik ini bermula pada tahun 2012 ketika terjadi bentrokan antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi telah dikritik oleh banyak negara dan organisasi internasional karena dianggap tidak melakukan tindakan yang cukup untuk menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Konflik ini menyoroti masalah kolonial Belanda di Myanmar dan bagaimana kolonial Belanda dan pemerintah Myanmar berkontribusi pada perwakilan dan marginalisasi masyarakat Rohingya. Konflik ini juga menyoroti hubungan antara global dan lokal, serta hubungan antara politik, ekonomi, agama, dan keamanan. Konflik ini menyoroti peran kompleks kepentingan internasional dalam memahami dan mengelola konflik ini, dan menyoroti pentingnya memahami konteks lokal dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghentikan kekerasan dan menyediakan akses ke tempat yang aman untuk masyarakat Rohingya.⁵

Pertama, Perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya di Myanmar memiliki dasar yang kuat dalam ketidaksetaraan status yang mereka miliki. Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingnya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Salah satu akar konflik tersebut adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar juga tidak

⁴ Sandy Nur Ikfal Raharjo, 'Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013', *Jurnal Kajian Wilayah*, 6.1 (2015), 35–59.

⁵ Alfi Revolusi, 'Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine Dan Rohingya Di Myanmar Tahun 2012', 2013.



mengakui serta tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat karena tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein pada tahun 2012, di mana Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh. Sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis namun warga Rohingya etnis Bengali tidak termasuk di dalamnya. Bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas etnis saja yang menyebabkan konflik antar etnis melainkan juga disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas (memberikan hak privilege pada etnis tertentu).

Kedua, Penyebab konflik etnis di Myanmar selanjutnya adalah adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa tahun terus meningkat. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya dianggap sebagai sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya. Keberadaan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin terancam oleh tindakan yang sewenang-wenang seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid, dan pemerkosaan.⁶ Etnis Rohingya yang banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan kekecewaannya pada etnis Rakhine yang jauh lebih dilindungi oleh pemerintah. Dampak terhadap etnis Rohingya yang menjadi korban perampasan tanah dan penindasan semakin memperbesar jurang kebencian terhadap etnis Rakhine yang dianggap lebih dilindungi oleh pemerintah. Akibatnya, tingkat kebencian dari warga Muslim Rohingya terhadap etnis Rakhine semakin memuncak, dan konflik antara kedua kelompok ini sering kali memunculkan kerusakan dan pertikaian yang berlarut-larut di Provinsi Rakhine. Ketegangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan etnis, tetapi juga mencakup aspek-aspek ekonomi, hak-hak tanah, dan perlindungan pemerintah yang berkontribusi pada kompleksitas dan keparahan konflik etnis di Myanmar.

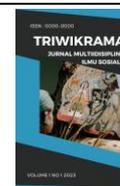
⁶ Khamami Zada and Atep Abdurrofiq, 'Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar (Studi Komparatif Hukum Internasional Dan Hukum Islam)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).



Ketiga, Pada masa Rezim Militer, terutama dari era Ne Win hingga tahun 2000, etnis Rohingya menghadapi tantangan berat akibat kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Junta Militer Myanmar. Salah satu praktik yang menyulitkan etnis Rohingya adalah kebijakan Burmanisasi yang semakin gencar dilakukan melalui implementasi program model village. Model village merupakan konsep perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha, seperti Buddha Rakhine dan orang Buddha lainnya yang sebagian besar berasal dari etnis Burma. Mereka didatangkan secara massal dan diberikan dukungan berupa pasokan bahan pangan serta pemukiman yang layak oleh pemerintah Myanmar. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini secara eksplisit menguntungkan kelompok etnis Burma, dan secara tidak langsung mengabaikan hak-hak dan keberlanjutan etnis Rohingya. Kebijakan Burmanisasi juga melibatkan penarikan tanah secara paksa dari warga Rohingya untuk membangun model village. Proses ini menyebabkan etnis Rakhine dan orang-orang Buddha diarahkan ke daerah mayoritas Muslim Rohingya, dengan pemerintah Myanmar bahkan menggantikan tempat-tempat suci Rohingya dengan struktur Buddha seperti biara, pagoda, dan asrama untuk biksu Rakhine. Etnis Rakhine direlokasi ke daerah-daerah model village yang pada awalnya adalah tanah milik etnis Rohingya. Praktik ini merampas tanah milik etnis Rohingya dan menempatkan etnis Rakhine di daerah tersebut, menciptakan konflik kepemilikan tanah yang merugikan etnis Rohingya. Dalam konsekuensinya, banyak desa dan keluarga Muslim Rohingya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian mereka, menjadikan mereka tunawisma dan menghadapi keterbatasan sumber daya hidup yang lebih lanjut. Pada akhirnya, kebijakan Burmanisasi menjadi salah satu elemen sentral yang memperparah kondisi etnis Rohingya di Myanmar, memicu ketidaksetaraan, konflik, dan penderitaan yang terus berlanjut hingga hari ini.⁷

Keempat, berita mengenai konflik antara etnis Rohingya dan Rakhine yang pada awalnya kurang dikenal oleh dunia luar mulai mencuat pada periode Juni-Agustus 2012, ketika media internasional mulai melaporkan secara intensif tentang peristiwa konflik Rohingnya. Pemberitaan ini menyoroti fakta-fakta terkait konflik tersebut, memicu reaksi dan perhatian internasional terhadap apa yang terjadi di Myanmar. Konflik mencapai puncaknya pada Juli 2012, yang ditandai dengan serangkaian pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya dan bentrokan fisik antara kedua kelompok etnis tersebut. Dalam kejadian tersebut, angkatan bersenjata dan polisi Myanmar diduga terlibat dalam memprovokasi konflik dan terlibat dalam serangan terhadap kamp-kamp Rohingya. Kondisi ini memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa, mengingat pada saat itu Myanmar sedang mengalami transisi menuju

⁷ M Angela Merici Siba and Anggi Nurul Qomari'ah, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingnya Human Right Violations on Rohingnya Conflict', *Islamic World and Politics*, 2.2 (2018), 367–85.



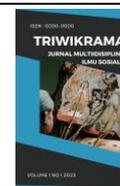
proses demokratisasi. Meskipun banyak pihak mengemukakan konflik, kritik tersebut cenderung tidak menyalahkan pemerintah Myanmar secara langsung sebagai penyebab utama konflik tersebut. Beberapa lembaga hak asasi manusia, seperti Amnesty Internasional dan Organisasi Hak Asasi Manusia dunia, menilai bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi sistematis terhadap etnis Rohingya. Diskriminasi ini dianggap sebagai faktor pendorong utama dari penderitaan yang terus mendera etnis Rohingya tanpa solusi yang jelas. Pemahaman mendalam terhadap konflik ini oleh lembaga-lembaga internasional membantu memperluas kesadaran akan masalah tersebut dan menekankan perlunya upaya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.⁸

Saat ini, konflik Muslim Rohingnya di Myanmar masih berlanjut dengan tingginya ketegangan dan kekhawatiran akan keberlanjutan pelanggaran hak asasi manusia. Pemulihan dan penyelesaian konflik memerlukan upaya bersama dari komunitas internasional, pemerintah Myanmar, dan kelompok etnis yang terlibat.

Latar belakang Konflik Muslim Palestina dengan Israel

Konflik Israel-Palestina, yang secara historis tidak pernah menemui solusi yang memuaskan, terus menjadi sorotan dunia. Eksistensi Israel-Yahudi tercermin dalam perjuangan yang terus menerus menjadi topik utama dalam perbincangan global. Akar konflik ini dapat ditelusuri dari asal-usul dan tujuan strategis pendiri Israel yang awalnya berasal dari Palestina, yang pada masa itu merupakan bagian dari Daulah Islamiyah di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Namun, akibat penjajahan oleh Inggris, wilayah ini akhirnya dikuasai oleh Israel, membuat penduduk asli Palestina kehilangan kemerdekaannya. Konflik Israel-Palestina terus menjadi fokus perhatian dunia internasional hingga saat ini. Pada intinya, konflik ini menggambarkan bagaimana militer Israel melancarkan serangan militer yang melibatkan berbagai jenis senjata dan taktik di wilayah Palestina, terutama di Jalur Gaza. Serangan tersebut melibatkan pembumihian masif melalui operasi darat, udara, dan laut, yang tidak hanya menargetkan militer lawan, tetapi juga mengenai anak-anak, perempuan, ibu hamil, penyandang disabilitas, paramedis, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan dan media. Situasi ini menggambarkan kompleksitas konflik dengan merinci dampak yang luas terhadap berbagai lapisan masyarakat Palestina. Pengeboman yang tidak membedakan sasaran menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Hal ini memperkuat urgensi untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan guna mengakhiri ketidakstabilan dan penderitaan yang terus berlanjut di kawasan tersebut.

⁸ Tri Joko Waluyo, 'Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingnya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar', *Transnasional*, 4.2 (2013), 834-47 <<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208>>.

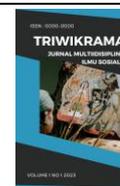


Konflik Israel-Palestina memiliki akar sejak abad ke-19 dengan munculnya gerakan Zionis yang menuntut tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pada masa itu, Palestina merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, dan keberadaan komunitas Yahudi dan Arab bersama-sama di wilayah ini menciptakan landasan yang rumit. Pada awal abad ke-20, gerakan Zionis semakin menguat, terutama setelah Perang Dunia I ketika Inggris menduduki Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 mendukung pembentukan "tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi" di Palestina. Setelah Perang Dunia II dan Holocaust, tekanan internasional untuk mendirikan negara Yahudi semakin meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1947 mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab Palestina. Meskipun proposal ini ditolak oleh pihak Arab, namun diadopsi oleh PBB. Pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin gerakan Zionis, mengumumkan pembentukan negara Israel, yang memicu Perang Kemerdekaan Israel dan Intifada 1948. Perang ini berakhir dengan gencatan senjata dan pembentukan garis armistice yang menetapkan batas wilayah Israel. Eksodus besar-besaran penduduk Palestina menyebabkan pembentukan kamp-kamp pengungsi, menciptakan masalah kemanusiaan yang kompleks dan menjadi sumber ketidakpuasan. Hasil dari Perang Enam Hari pada tahun 1967 meningkatkan wilayah Israel, termasuk Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, menciptakan ketegangan baru dan meningkatkan ketidaksetujuan dari komunitas Muslim Palestina.⁹

Dalam upaya untuk mencapai perdamaian, Perjanjian Oslo ditandatangani pada tahun 1993 antara Israel dan Otoritas Palestina, membentuk struktur otonomi terbatas di beberapa wilayah Palestina. Meskipun perjanjian ini dimaksudkan untuk membawa stabilitas, implementasinya terkendala oleh sejumlah masalah, termasuk status Yerusalem dan hak-hak tanah. Tepi Barat dan Jalur Gaza kemudian menjadi pusat ketegangan lebih lanjut.¹⁰ Pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat menciptakan sumber ketidakpuasan, sedangkan Gaza menghadapi blokade ekonomi dan kemanusiaan yang merugikan warga Palestina. Status Yerusalem, terutama Kota Lama yang memiliki signifikansi religius bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi, menjadi pemicu konflik berulang. Keputusan Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel memicu protes dan ketegangan. Masalah pengungsi Palestina, yang muncul sebagai konsekuensi dari Perang Kemerdekaan Israel dan Perang Enam Hari, tetap menjadi titik senggolan. Jutaan orang Palestina menjadi pengungsi, dan isu ini menjadi salah satu hambatan utama dalam

⁹ Firdaus Firdaus and others, 'Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)', *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10.1 (2020), 1–12.

¹⁰ Siti Karomah Silpiah and others, 'Perjanjian Oslo Dalam Proses Perdamaian Dan Peran Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel', *HISTORICAL: Journal*, 1.1 (2022).



perundingan perdamaian. Konflik ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan kelompok bersenjata, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari penduduk di wilayah tersebut. Kondisi kemanusiaan yang sulit, kehilangan nyawa, dan dampak sosio-ekonomi yang merugikan semakin memperumit upaya perdamaian.¹¹ Dengan demikian, meskipun terdapat upaya untuk mencapai kesepakatan, konflik ini terus menciptakan dinamika kompleks dan menghadapi tantangan yang berkelanjutan dalam perjalanan menuju perdamaian di kawasan tersebut.

Perbedaan dan Persamaan Antara Konflik Muslim di Rohingya dengan Palestina-Israel

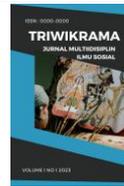
Perbedaan dan persamaan antara konflik Muslim di Rohingya dan konflik Palestina-Israel menyoroiti kompleksitas dan variasi dalam dinamika konflik di dunia Muslim. Meskipun kedua konflik ini melibatkan komunitas Muslim dan melibatkan ketidaksetaraan hak serta ketidakadilan, terdapat perbedaan signifikan dalam asal-usul, dinamika geopolitik, dan respons internasional.

Perbedaan pertama terletak pada asal-usul konflik. Konflik Rohingya berkaitan dengan sejarah panjang di Myanmar, di mana etnis minoritas ini dianggap sebagai imigran ilegal dan diabaikan oleh pemerintah, menghadapi pembatasan hak kewarganegaraan, pendidikan, dan akses layanan kesehatan. Di sisi lain, konflik Israel-Palestina memiliki akar sejak abad ke-19 dengan munculnya gerakan Zionis yang menuntut tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, menciptakan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab yang bersama-sama mendiami wilayah tersebut.

Perbedaan kedua terletak pada dinamika geopolitik. Konflik Rohingya lebih terfokus secara internal di Myanmar, meskipun telah mendapatkan perhatian internasional terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, konflik Palestina-Israel terkait dengan kontroversi wilayah dan klaim atas Jerusalem yang memiliki signifikansi religius bagi tiga agama utama: Islam, Kristen, dan Yahudi. Dinamika geopolitik yang melibatkan kekuatan regional dan internasional membuat konflik Israel-Palestina memiliki dampak lebih luas dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan global.

Namun, terdapat juga persamaan antara kedua konflik tersebut. Kedua konflik melibatkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Myanmar, etnis Rohingya mengalami serangkaian tindakan kekerasan seperti penjarahan, pemusnahan tempat tinggal, pembakaran masjid, dan pemerkosaan oleh etnis Rakhine. Seiringnya, di Palestina, banyak warga sipil menjadi korban kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, dengan korbannya yang terutama terdiri dari anak-anak, perempuan, dan pasien rumah sakit. Kedua konflik ini menciptakan penderitaan manusia yang mendalam dan merugikan, mengekspos kompleksitas

¹¹ KASWARI ERMAN, 'KONFLIK ANTARA PALESTINA-ISRAEL STUDI KASUS PEREBUTAN TANAH (2010-2015)' (Universitas_Muhammadiyah_Mataram, 2023).



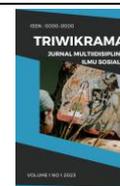
konsekuensi kemanusiaan dari ketegangan etnis dan politik. Selain itu, upaya penyelesaian konflik di kedua wilayah tersebut juga menunjukkan persamaan. Meskipun melibatkan berbagai elemen seperti isu wilayah, agama, sejarah, dan politik, kedua konflik belum mencapai titik temu yang memuaskan. Upaya-upaya untuk mencari solusi sering kali terkendala oleh perbedaan pandangan dan ketidaksetujuan antara pihak-pihak yang terlibat. Kompleksitas faktor-faktor ini menjadikan tantangan yang sulit dihadapi, memperpanjang penderitaan dan ketidakpastian bagi penduduk di wilayah tersebut.

Dalam konteks hubungan internasional, kedua konflik ini juga membentuk dinamika yang kompleks. Berbagai negara di dunia menunjukkan sikap yang berbeda terhadap kedua konflik ini, baik dalam bentuk dukungan terhadap upaya perdamaian maupun dalam kebijakan tidak campur tangan. Peran negara-negara di dunia menjadi sangat krusial dalam membantu menyelesaikan konflik ini. Kolaborasi global diperlukan untuk mencari solusi yang adil dan memperhatikan hak asasi manusia serta keamanan warga sipil yang terdampak oleh kedua konflik tersebut. Kesadaran internasional dan aksi bersama menjadi kunci dalam menanggapi tantangan kompleks ini, dengan harapan dapat membawa kedamaian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dampak Konflik Muslim Rohingnya di Myanmar Terhadap Hubungan Luar Negeri Negeranya di Berbagai Sektor

Konflik Muslim Rohingnya di Myanmar telah memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan luar negeri negara tersebut di berbagai sektor. Konflik ini telah menarik perhatian dunia dan memengaruhi hubungan Myanmar dengan sejumlah negara dan lembaga internasional.

Pertama, Dampak kemanusiaan dan HAM. Dampak kemanusiaan dan hak asasi manusia dari konflik Muslim Rohingnya di Myanmar menciptakan sebuah tragedi yang melibatkan pelanggaran hak-hak dasar manusia. Konflik ini bukan hanya memunculkan krisis kemanusiaan yang besar, tetapi juga menghadirkan serangkaian tindakan yang merusak martabat kemanusiaan. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan seksual, pembunuhan brutal, dan pengusiran massal, menjadi sorotan utama yang mengundang kecaman dan keprihatinan dari komunitas internasional. Keberanian untuk memberlakukan kebijakan etnis yang mendiskriminasi dan merampas hak-hak dasar warga Rohingnya mengguncang prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional mengarahkan sorotan mereka ke pemerintah Myanmar, mengecam tindakan kejam dan tidak manusiawi yang merugikan kaum Rohingnya. Dalam konteks ini, dampaknya bukan hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga merayap ke dimensi internasional dengan merosotnya citra Myanmar di



mata komunitas global.¹² Negara-negara dan lembaga internasional menilai pemerintah Myanmar berdasarkan responsnya terhadap konflik ini, dan kegagalan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia dapat memperburuk isolasi diplomatik dan tekanan internasional. Oleh karena itu, dampak kemanusiaan dan hak asasi manusia dari konflik Muslim Rohingya di Myanmar tidak hanya memengaruhi warga Myanmar secara langsung, tetapi juga membawa konsekuensi yang serius dalam konteks hubungan internasional.

Kedua, Sanksi Internasional dan Pembatasan Ekonomi. Sanksi internasional dan pembatasan ekonomi yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar telah memberikan dampak yang signifikan pada sektor ekonomi negara tersebut. Keputusan beberapa negara dan organisasi internasional untuk memberlakukan sanksi telah menciptakan tantangan ekonomi serius bagi Myanmar. Pembatasan perdagangan yang diterapkan dapat merugikan sektor ekspor dan impor Myanmar, mempersempit akses pasar global dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembatasan investasi juga menjadi hambatan serius, mengingat investasi asing dapat menjadi sumber modal yang penting untuk pembangunan ekonomi. Pelarangan bantuan luar negeri juga dapat berdampak negatif pada sektor kesejahteraan dan pembangunan sosial di Myanmar. Dampak sanksi dan pembatasan ekonomi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Masyarakat yang telah terdampak konflik dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi lebih rentan terhadap dampak ekonomi negatif ini. Ketidakstabilan ekonomi dapat menciptakan beban tambahan bagi warga Myanmar yang telah menghadapi tantangan kemanusiaan yang besar.¹³ Oleh karena itu, sanksi internasional bukan hanya merupakan tekanan terhadap pemerintah, tetapi juga membawa konsekuensi yang nyata bagi kesejahteraan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam jangka panjang, pembatasan ekonomi ini dapat memperlambat pembangunan ekonomi Myanmar dan menghambat upaya menuju kestabilan. Oleh karena itu, dampak sanksi internasional dan pembatasan ekonomi terhadap Myanmar tidak hanya terbatas pada tingkat politik, melainkan juga meresap ke dalam struktur ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring waktu, pemerintah Myanmar dihadapkan pada tugas untuk menavigasi kompleksitas tantangan ekonomi ini sambil berusaha membangun kembali citra mereka di mata komunitas internasional.

Ketiga, Isolasi Diplomatik. Konflik Rohingya telah menciptakan isolasi diplomatik yang signifikan bagi Myanmar. Beberapa negara, termasuk anggota Uni

¹² Veronika Wulandari, 'Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Persepektif Sejarah Dan Hukum Internasional', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.3 (2022), 31–58.

¹³ Imanuddin Imran, 'LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL' (Universitas Hasanuddin, 2022).

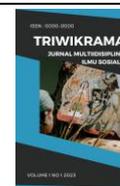


Eropa dan Amerika Serikat, merespons dengan sikap kritis terhadap tindakan pemerintah Myanmar terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State. Respons ini tidak hanya berhenti pada pernyataan kritik semata, tetapi juga berdampak pada hubungan diplomatik antara Myanmar dan sejumlah negara. Isolasi diplomatik ini mengakibatkan pembatasan kapasitas Myanmar untuk berpartisipasi secara efektif dalam forum-forum internasional. Partisipasi yang terbatas di panggung internasional dapat menghambat kemampuan Myanmar untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya, terlibat dalam dialog internasional, dan membangun kerja sama bilateral. Dalam konteks ini, isolasi diplomatik tidak hanya menjadi hambatan bagi dialog konstruktif, tetapi juga merugikan citra negara di mata komunitas internasional. Selain itu, isolasi diplomatik juga dapat berdampak pada sektor ekonomi dan keamanan. Hubungan bilateral yang terbatas dapat menghambat akses Myanmar terhadap sumber daya ekonomi, investasi, dan bantuan internasional. Keterbatasan ini dapat menciptakan tantangan lebih lanjut bagi perekonomian Myanmar, terutama dalam menghadapi dampak konflik dan krisis kemanusiaan di dalam negeri.¹⁴ Dengan isolasi diplomatik yang terus berlanjut, Myanmar dihadapkan pada tekanan untuk memulihkan hubungan internasionalnya dan mencari solusi untuk konflik Rohingya. Proses diplomasi dan dialog menjadi semakin kritis dalam menanggapi tuntutan komunitas internasional dan membangun kembali kepercayaan dengan negara-negara yang telah mengisolasi Myanmar.

Keempat, Pembatasan Perdagangan dan Investasi. Dampak ekonomi konflik Rohingya tercermin dalam pembatasan perdagangan dan investasi. Negara-negara dan perusahaan internasional cenderung berhati-hati dalam menjalin keterlibatan ekonomi dengan Myanmar. Sejumlah perusahaan dapat menunda atau menghindari investasi di negara tersebut karena risiko reputasi yang terkait dengan krisis kemanusiaan di Rakhine. Pembatasan perdagangan juga dapat menghambat akses Myanmar ke pasar global, sementara pembatasan investasi dapat mengurangi arus modal dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Hal ini dapat merugikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara, serta mempengaruhi lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan perdagangan dan investasi yang terkait dengan konflik Rohingya telah menciptakan tantangan ekonomi yang serius bagi Myanmar, yang memerlukan upaya serius untuk mengatasi dampak-dampak negatifnya dan memulihkan kepercayaan komunitas internasional dalam berinvestasi dan berdagang dengan negara tersebut.

Kelima, Pengungsi dan Masalah Regional. Dampak konflik Rohingya pada tingkat regional terlihat melalui fluktuasi jumlah pengungsi yang bermigrasi ke negara-negara tetangga, khususnya Bangladesh. Kehadiran jumlah besar pengungsi

¹⁴ Moh Rosyid, 'Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai', *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14.2 (2019), 159–96.



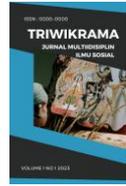
Rohingya di Bangladesh menciptakan tantangan dan beban tambahan bagi negara-negara di kawasan tersebut. Penanganan masalah kemanusiaan dan penyediaan bantuan kepada pengungsi memerlukan sumber daya yang signifikan dan dapat menciptakan tekanan ekonomi serta sosial bagi negara-negara penerima. Masalah ini tidak hanya menjadi beban bagi negara penerima, tetapi juga memengaruhi dinamika regional dan hubungan antar-negara. Ketegangan dan pergesekan yang muncul akibat peningkatan jumlah pengungsi dapat menciptakan kompleksitas dalam diplomasi regional dan geopolitik di Asia Tenggara. Negara-negara di kawasan tersebut mungkin menghadapi dilema terkait kebijakan pengungsi dan upaya penyelesaian konflik, yang dapat memperkeruh hubungan bilateral. Selain itu, fluktuasi pengungsi Rohingya juga dapat memicu ketegangan antara negara-negara yang berbagi batas dengan Myanmar. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan pandangan terkait penanganan pengungsi atau kekhawatiran terhadap destabilisasi regional yang mungkin timbul dari krisis kemanusiaan di Myanmar.¹⁵

Dampak Konflik Muslim Palestina dengan Israel Terhadap Hubungan Luar Negeri Negeranya di Berbagai Sektor

Konflik antara Muslim Palestina dan Israel telah memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan luar negeri kedua belah pihak di berbagai sektor. Dampak ini meliputi hubungan diplomatik, ekonomi, kemanusiaan, dan keamanan, serta memengaruhi dinamika regional di Timur Tengah.

Pertama, Isolasi Diplomatik dan Ketidakstabilan Politik. Konflik Israel-Palestina telah menciptakan isolasi diplomatik bagi Israel di beberapa forum internasional. Beberapa negara dan organisasi regional mengecam tindakan Israel, terutama terkait dengan pendudukan wilayah Palestina dan pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat. Akibatnya, sejumlah negara telah membatasi atau bahkan memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Israel sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan bagi rakyat Palestina. Isolasi diplomatik ini menciptakan tantangan besar bagi Israel dalam berinteraksi dengan komunitas internasional, terutama dalam upaya memperoleh dukungan dan pemahaman atas tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan di wilayah konflik. Selain itu, konflik ini juga telah menciptakan ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah. Sengketa terus-menerus antara Israel dan Palestina, bersama dengan dukungan yang bervariasi dari negara-negara di sekitarnya, menciptakan ketidakpastian dan tegangan dalam hubungan internasional di kawasan tersebut. Ketidakstabilan politik ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral antara Israel dan negara-negara tetangga, tetapi juga memainkan peran dalam dinamika geopolitik yang lebih luas. Ketidakpastian ini menciptakan lingkungan

¹⁵ Budi Budaya, 'Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar', *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*, 11.01 (2017), 106–20.



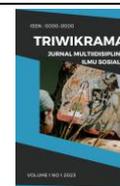
yang sulit untuk perdamaian dan kerjasama di Timur Tengah, dengan konflik terus meruncing dan memperumit upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan. Seiring terus berlanjutnya konflik, isolasi diplomatik dan ketidakstabilan politik ini menjadi unsur kritis dalam menilai dampak konflik Israel-Palestina terhadap hubungan luar negeri Israel di berbagai sektor. Peran Israel di dunia internasional dan posisinya di antara negara-negara tetangga semakin dipertanyakan, menciptakan tantangan yang signifikan dalam meraih pemahaman dan solusi yang dapat diterima secara global.¹⁶

Kedua, Sanksi Ekonomi dan Pembatasan Perdagangan. Sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan yang diterapkan oleh sejumlah negara dan organisasi sebagai respons terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional menciptakan dampak ekonomi serius bagi negara tersebut. Tindakan sanksi ini dirancang untuk memberikan tekanan dan memberikan sinyal keras atas pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan yang dianggap kontroversial oleh pemerintah Israel. Pembatasan perdagangan dan investasi memperumit hubungan ekonomi Israel dengan sejumlah mitra dagangnya. Negara-negara yang menerapkan sanksi ekonomi cenderung mengurangi investasi dan perdagangan dengan Israel, menciptakan tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara tersebut. Selain itu, kampanye boikot internasional terhadap produk Israel juga memberikan dampak ekonomi signifikan. Boykot ini menciptakan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi dan berpotensi merugikan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian Israel.¹⁷ Dampak dari sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan ini menciptakan tekanan ekonomi yang nyata dan memberikan sinyal bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan yang dianggap kontroversial memiliki konsekuensi nyata di tingkat internasional. Hal ini menciptakan dinamika hubungan ekonomi yang rumit dan memengaruhi perkembangan ekonomi Israel dalam konteks hubungan internasional yang terus berubah.

Ketiga, Dampak Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia. Konflik Israel-Palestina telah menimbulkan dampak serius terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Serangan militer yang terus-menerus dan blokade ekonomi yang diterapkan terutama di Jalur Gaza telah menciptakan kondisi kemanusiaan yang sulit dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Serangan-serangan militer yang melibatkan berbagai jenis senjata dan taktik telah menyebabkan korban sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia. Rumah-rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur sipil lainnya menjadi sasaran,

¹⁶ Kiagus Zaenal Mubarak, 'Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2.1 (2020), 54–67.

¹⁷ MUHAMMAD MUZAWIKUL ANAM, 'KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DALAM BOIKOT PRODUK ISRAEL PASCA KONFLIK GAZA TAHUN 2008-2009' (UPN "Veteran" Yogyakarta, 2012).



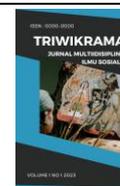
menciptakan situasi darurat kemanusiaan. Blokade ekonomi yang diterapkan oleh Israel di Jalur Gaza juga memperparah kondisi ini dengan membatasi akses penduduk terhadap sumber daya dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Keadaan kemanusiaan yang sulit ini telah menarik perhatian komunitas internasional dan memicu kritik terhadap Israel. Berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional telah mengemukakan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik ini. Dampak kemanusiaan ini tidak hanya menciptakan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya bagi penduduk setempat, tetapi juga mempengaruhi persepsi global terhadap Israel.¹⁸ Negara ini mendapat tekanan dan kritik atas tindakan militer dan kebijakan yang dianggap merugikan hak asasi manusia, menciptakan tantangan dalam hubungan internasional dan mendefinisikan citra Israel di panggung global.

Keempat, Ketegangan Regional dan Pengaruh Global. Ketegangan regional yang muncul akibat konflik Israel-Palestina menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan antarnegara di Timur Tengah. Negara-negara di kawasan ini, terutama yang mendukung Palestina, mungkin menghadapi ketegangan dan konflik dengan Israel. Hubungan regional terpolarisasi, dan respons terhadap konflik ini dapat menciptakan garis-garis perpecahan yang mendalam di antara negara-negara di sekitarnya. Pengaruh global dari konflik ini juga tidak dapat diabaikan. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh pihak-pihak terlibat dalam konflik ini, terutama Israel, dapat membentuk persepsi dan sikap terhadap negara tersebut di tingkat global. Reputasi internasional suatu negara seringkali terkait erat dengan keterlibatannya dalam konflik dan kebijakan yang diambil dalam meresponnya. Oleh karena itu, Israel mungkin menghadapi tantangan diplomasi yang signifikan dan pengaruhnya di berbagai forum internasional dapat terpengaruh. Dalam konteks ini, konflik Israel-Palestina tidak hanya menciptakan ketegangan regional tetapi juga memperkuat atau merongrong posisi geopolitik suatu negara di tingkat global. Persepsi internasional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini memainkan peran penting dalam membentuk dinamika hubungan internasional dan dapat mempengaruhi sejauh mana suatu negara dapat mempertahankan atau meningkatkan hubungannya di panggung global.¹⁹

Kelima, Tantangan Diplomasi dan Perdamaian. Tantangan diplomasi dan perdamaian yang muncul akibat konflik Israel-Palestina sangat kompleks dan sulit diatasi. Perbedaan pendapat yang mendasar mengenai status Yerusalem, hak-hak tanah, dan nasib pengungsi Palestina menjadi hambatan utama dalam mencapai

¹⁸ Atep Abdurofiq, 'Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Israel Atas Palestina' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁹ Yon Machmudi, *Timur Tengah Dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia* (Bumi Aksara, 2021).



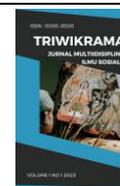
kesepakatan damai di kawasan tersebut. Poin-poin ini memiliki signifikansi historis, budaya, dan agama bagi kedua pihak, sehingga mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak menjadi sangat rumit. Ketidaksepakatan mengenai status Yerusalem, sebagai contoh, menciptakan ketegangan yang mendalam. Kota suci ini memiliki nilai simbolis dan religius yang tinggi bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam. Klaim dan tuntutan atas Yerusalem menjadi salah satu pemicu utama ketegangan, dan penyelesaian yang memuaskan untuk semua pihak terlibat menjadi sulit dicapai. Hak-hak tanah dan masalah pengungsi Palestina juga menjadi kendala serius. Masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai batas wilayah dan hak kepemilikan tanah, sementara nasib pengungsi Palestina memicu ketidaksetujuan yang dalam. Negosiasi mengenai isu-isu ini memerlukan kompromi yang sulit dan sering kali bertentangan dengan klaim sejarah dan kepentingan nasional. Tantangan ini mempersulit upaya diplomasi dan perdamaian di kawasan tersebut. Negosiasi yang terhenti-henti dan seringkali kegagalan perundingan mencerminkan kompleksitas konflik ini.²⁰ Tantangan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan mendapatkan dukungan internasional terus menjadi fokus dalam upaya mencari solusi berkelanjutan bagi konflik Israel-Palestina.

Secara keseluruhan, dampak konflik antara Muslim Palestina dan Israel terhadap hubungan luar negeri kedua belah pihak menciptakan tantangan dan ketidakpastian yang merambat ke berbagai aspek kehidupan nasional dan internasional. Dalam ranah hubungan internasional, polarisasi pendapat dan dukungan terhadap salah satu pihak konflik menciptakan ketidakseimbangan diplomasi global. Negara-negara Arab umumnya mendukung Palestina, sementara beberapa negara Barat, terutama Amerika Serikat, cenderung mendukung Israel. Upaya-upaya untuk mengatasi konflik ini dan mencapai perdamaian terus menjadi fokus dalam upaya diplomasi global. Tantangan tersebut menuntut kreativitas, kompromi, dan kerjasama internasional yang kuat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, sehingga konflik Israel-Palestina dapat diakhiri dan stabilitas di kawasan tersebut dapat dipulihkan.

Komparasi Perbedaan Aksi, Reaksi dan Sikap Berbagai Negara Dunia Terhadap Konflik Muslim Rohingnya dan Palestina-Israel

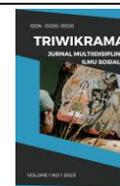
Konflik Muslim Rohingnya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel telah menarik perhatian dunia internasional dan memicu reaksi dari berbagai negara di seluruh dunia. Meskipun kedua konflik tersebut memiliki perbedaan dalam konteks sejarah, budaya, dan politik, namun ada beberapa perbandingan dalam aksi, reaksi, dan sikap berbagai negara dunia terhadap kedua konflik tersebut.

²⁰ Sari Ratna, 'Diplomasi Kemanusiaan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kawasan Konflik (Studi Tentang Diplomasi Kemanusiaan MER-C Di Jalur Gaza Palestina)', 2023.



Konflik Muslim Rohingya di Myanmar menyulut kecaman luas dari banyak negara dan organisasi internasional, khususnya terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, merespons dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar sebagai bentuk protes terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahnya. Reaksi terhadap konflik Rohingya tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga mencakup tindakan ekonomi yang dapat memberikan tekanan lebih lanjut pada pemerintah Myanmar. Konflik ini juga merusak hubungan diplomatik Myanmar dengan negara-negara tetangganya, seperti Bangladesh dan Indonesia, yang merasa terpenggil untuk mengancam perlakuan terhadap etnis Rohingya. Di sektor kemanusiaan, konflik Rohingya menyebabkan jutaan orang mengungsi dan menjadi pengungsi di negara-negara tetangga. Respons negatif terhadap perlakuan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya juga mencakup kritik terhadap kurangnya perlindungan dan bantuan yang memadai kepada mereka yang terkena dampak konflik. Keadaan ini menggambarkan kebutuhan akan respons internasional yang lebih efektif untuk menangani krisis kemanusiaan dan memberikan perlindungan kepada korban konflik.

Konflik Muslim Palestina-Israel telah memicu berbagai reaksi dan sikap yang mencerminkan keragaman pandangan di tingkat global. Negara-negara di dunia Arab dan sebagian besar negara Muslim mengambil sikap tegas mengancam tindakan Israel dan memberikan dukungan politik serta bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Respons ini mencerminkan solidaritas sebagian besar negara Muslim terhadap perjuangan rakyat Palestina dan penolakan terhadap tindakan militer Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Di sisi lain, beberapa negara Barat, terutama Amerika Serikat, memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel. Reaksi negara-negara Eropa bervariasi, namun banyak di antaranya menekankan pentingnya mencapai solusi damai dan mengancam tindakan kekerasan dari kedua belah pihak. Perbedaan dalam pendekatan ini mencerminkan kompleksitas faktor sejarah, politik, dan budaya yang memengaruhi sikap negara-negara tersebut terhadap konflik tersebut. Selain itu, perbedaan sikap juga terlihat dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa negara mendukung resolusi yang mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, sementara negara lain mungkin memilih untuk abstain atau menolak resolusi tersebut. Hal ini mencerminkan perpecahan dan ketegangan di tingkat internasional terkait dengan cara penyelesaian dan penilaian terhadap konflik tersebut. Peran PBB sebagai mediasi dan perumus solusi konflik terus menjadi fokus



perdebatan di tingkat internasional, menunjukkan tantangan dalam mencapai konsensus global terkait konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini.²¹

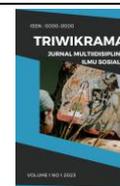
Dalam kasus konflik Muslim Rohingnya, respons internasional mencakup serangkaian tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang berkembang. Sejumlah negara dan organisasi internasional telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Rohingnya yang menjadi korban konflik. Bantuan finansial dan kemanusiaan diberikan untuk membantu pengungsi Rohingnya yang menghadapi kondisi sulit di kamp-kamp pengungsian. Langkah-langkah ini mencerminkan keinginan untuk meredakan penderitaan dan memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak. Di sisi lain, dalam kasus konflik Palestina-Israel, banyak negara telah menyuarakan dukungan politik dan finansial kepada Palestina sebagai upaya untuk membantu rakyat Palestina yang terkena dampak konflik.²² Negara-negara ini umumnya mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan hukuman kolektif terhadap warga Palestina. Beberapa negara juga memilih untuk menerapkan sanksi ekonomi dan pembatasan perdagangan terhadap Israel sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap merugikan bagi rakyat Palestina. Dengan memberikan dukungan finansial dan politik kepada pihak yang dianggap menjadi korban, baik dalam kasus konflik Muslim Rohingnya maupun Palestina-Israel, negara-negara tersebut berusaha menunjukkan solidaritas internasional dan mendukung upaya penyelesaian damai. Tindakan ini mencerminkan ketidaksetujuan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan kebijakan yang dianggap tidak adil, serta menegaskan komitmen terhadap penyelesaian konflik melalui dialog diplomatik dan resolusi yang adil.²³

Dalam kedua konflik, peran organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), telah menjadi sangat signifikan. Dalam konteks konflik Muslim Rohingnya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel, kedua organisasi ini telah berperan aktif dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang timbul. Dalam tanggapannya terhadap kekerasan yang terjadi, PBB tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mengambil sikap tegas dengan mengecam tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar dan wilayah Palestina. PBB menuntut tindakan yang tegas dari pemerintah Myanmar dan Israel untuk menghentikan kekerasan tersebut, dan hal ini mencerminkan komitmen organisasi internasional ini terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. PBB juga berperan sebagai

²¹ Sahal Ahmad Zaki, 'Isu Konflik Israel-Palestina Dan Reaksi Dunia Internasional', 1–5.

²² Gonda Yumitro, 'Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingnya', *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3.2 (2017), 81–100.

²³ Yumitro.

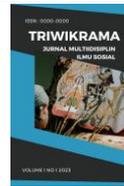


mediator dan advokat di tingkat internasional. Organisasi ini berusaha membawa isu krisis kemanusiaan di kedua konflik ke forum internasional seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Melalui kegiatan diplomasi dan advokasi, PBB berupaya memobilisasi dukungan internasional untuk menangani krisis kemanusiaan tersebut, menekankan pentingnya kerja sama dan respons global dalam menanggapi tantangan besar ini. Dalam kasus konflik Palestina-Israel, PBB juga telah berperan dalam merumuskan resolusi dan rekomendasi untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik tersebut. PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik melalui negosiasi damai. Namun, implementasi resolusi tersebut sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara anggota PBB.

Komparasi perbedaan aksi, reaksi, dan sikap berbagai negara dunia terhadap konflik Muslim Rohingnya dan Palestina-Israel mencerminkan kompleksitas dalam dinamika geopolitik dan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor seperti sejarah, kepentingan strategis, dan pandangan ideologis memainkan peran penting dalam membentuk sikap berbagai negara terhadap konflik-konflik ini. Sejarah konflik ini dan hubungan politik antara negara-negara mempengaruhi sikap dan respons terhadap konflik tersebut. Kepentingan strategis negara-negara, seperti kepentingan dalam politik internasional, ekonomi, dan keamanan, juga mempengaruhi bagaimana negara tersebut menangani konflik ini dan menentukan sikap mereka terhadap kedua belah pihak konflik. Selain itu, pandangan ideologis, seperti posisi terhadap hukum humaniter, demokrasi, dan tuntutan nasional, mempengaruhi bagaimana negara-negara mengevaluasi konflik ini dan menentukan sikap mereka terhadap kedua belah pihak konflik. Dengan demikian, komparasi perbedaan aksi, reaksi, dan sikap berbagai negara dunia terhadap konflik Muslim Rohingnya dan Palestina-Israel menunjukkan bagaimana faktor-faktor berbeda mempengaruhi dinamika geopolitik dan kebijakan luar negeri dalam menangani konflik ini.

Kesimpulan

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik Muslim Rohingnya di Myanmar dan konflik Palestina-Israel mencerminkan kompleksitas dalam dinamika geopolitik dan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor seperti sejarah, kepentingan strategis, dan pandangan ideologis memainkan peran penting dalam membentuk sikap berbagai negara terhadap konflik-konflik ini. Respons internasional terhadap konflik Muslim Rohingnya menunjukkan perlunya upaya bersama untuk menangani krisis kemanusiaan dan memberikan perlindungan kepada korban konflik. Sementara itu, konflik Palestina-Israel terus menjadi fokus perhatian dunia internasional, dengan serangkaian resolusi PBB yang menyerukan perdamaian dan penghentian kekerasan, namun implementasinya sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi dari negara-negara anggota PBB. Dengan demikian,



penyelesaian kedua konflik ini memerlukan komitmen kuat dari komunitas internasional dan negara-negara terkait untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan menyelesaikan krisis kemanusiaan yang terus berlanjut.

Referensi

- Abdurofiq, Atep, 'Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Israel Atas Palestina' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- ANAM, MUHAMMAD MUZAWIKUL, 'KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DALAM BOIKOT PRODUK ISRAEL PASCA KONFLIK GAZA TAHUN 2008-2009' (UPN" Veteran" Yogyakarta, 2012)
- Budaya, Budi, 'Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar', *Jurnal Ilmu Ilmiah Ilmu Hukum*, 11.01 (2017), 106–20
- ERMAN, KASWARI, 'KONFLIK ANTARA PALESTINA-ISRAEL STUDI KASUS PEREBUTAN TANAH (2010-2015)' (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023)
- Firdaus, Firdaus, Johan Septian Putra, Reni Saaulia, and Sulfina Adnis, 'Yasser Arafat Dan Konflik Palestina-Israel (Tinjauan Sejarah)', *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 10.1 (2020), 1–12
- Hamli, Moh, 'Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel Dan Palestina (1920-1993)' (UIN SUNAN KALIJAGA, 2013)
- Imran, Imanuddin, 'LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL' (Universitas Hasanuddin, 2022)
- Machmudi, Yon, *Timur Tengah Dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)
- Mubarok, Kiagus Zaenal, 'Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism', *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2.1 (2020), 54–67
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal, 'Peran Identitas Agama Dalam Konflik Di Rakhine Myanmar Tahun 2012–2013', *Jurnal Kajian Wilayah*, 6.1 (2015), 35–59
- Ratna, Sari, 'Diplomasi Kemanusiaan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kawasan Konflik (Studi Tentang Diplomasi Kemanusiaan MER-C Di Jalur Gaza Palestina)', 2023
- Revolusi, Alfi, 'Faktor-Faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine Dan Rohingya Di Myanmar Tahun 2012', 2013
- Rosyid, Moh, 'Genosida Etnis Muslim Rohingya Dan Partisipasi Indonesia Dalam Bina Damai', *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14.2 (2019), 159–96
- Semiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010)
- Siba, M Angela Merici, and Anggi Nurul Qomari'ah, 'Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict', *Islamic*



- World and Politics*, 2.2 (2018), 367–85
- Silpiah, Siti Karomah, Siti Rosanti, Siti Mundiroh, and Sri Ayuni, 'Perjanjian Oslo Dalam Proses Perdamaian Dan Peran Amerika Serikat Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel', *HISTORICAL: Journal*, 1.1 (2022)
- Waluyo, Tri Joko, 'Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar', *Jurnal Transnasional*, 4.2 (2013)
- — —, 'Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar', *Transnasional*, 4.2 (2013), 834–47
<<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1208>>
- Wulandari, Veronika, 'Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Persepektif Sejarah Dan Hukum Internasional', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.3 (2022), 31–58
- Yumitro, Gonda, 'Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya', *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3.2 (2017), 81–100
- Zada, Khamami, and Atep Abdurrofiq, 'Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar (Studi Komparatif Hukum Internasional Dan Hukum Islam)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Zaki, Sahal Ahmad, 'Isu Konflik Israel-Palestina Dan Reaksi Dunia Internasional', 1–